

Strategi Soft Power Yonif 731/Kabaresi dalam Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Maluku

Adi Kurniawan¹ Hikmat Zakky Almubaroq² Ruby Alamsyah³

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: kaylacipit@gmail.com¹ zakkyauri94@gmail.com² rbyalamsyah@gmail.com³

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi *soft power* yang diterapkan oleh Yonif 731/Kabaresi dalam Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Ops Pamrahwan) di Maluku. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk kerawanan wilayah, menganalisis pendekatan *soft power* yang diterapkan satuan, serta menentukan indikator keberhasilan pendekatan tersebut dalam mendukung stabilitas keamanan. Penelitian dilaksanakan di wilayah Maluku dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dan desain fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi terhadap personel Yonif 731/Kabaresi, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerawanan di Maluku bersifat multidimensional, meliputi residu konflik, kesenjangan layanan antar pulau, keterisolasian geografis, serta kerawanan informasi. Pendekatan *soft power* melalui diplomasi militer dan pembinaan teritorial terbatas mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, serta memperkuat kohesi sosial sehingga berkontribusi pada stabilitas keamanan wilayah secara berkelanjutan.

Keywords: soft power, Ops Pamrahwan, Yonif 731/Kabaresi, Maluku



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

INTRODUCTION

Articles are written on A4 size paper with top 2 margins, bottom 2, right 2, and left 2. Introduction typed in Cambria (Headings) size 12 pt. space 1, after 0 before 0. The beginning of the paragraph is indented to the right with left and right alignment. The length of the introduction ranges from 1000-1500 words consisting of research background, grounded theory, relevant previous research, formulation and list of references. Avoid critical and bombastic sentences. The header contains the name QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume and Number, Month and Year of publication, and P-ISSN Number: and E-ISSN: using Cambria (Headings) Bold size 12 pt and in red indented on the right side. While the Footer contains the page on the right, as well as the name of the author and the origin of the institution. If the author consists of 2 people just use the & sign. If there are more than 2 authors, it is sufficient to include et al. And if the three agencies are different, only the first author's agency is listed. The introduction begins (briefly, eg maximum 1 paragraph) the general background of the study; then it should include a State of the Art (a brief review of literature or previous research, 1-2 paragraphs) with the aim of justifying/strengthening the novelty statement or the significance or scientific contribution or originality of this article and try to have references to articles from journals 10 recent years that substantiate the justification of the originality or contribution); Before writing the purpose of the study, there must be a clear and explicit Gap Analysis or statement of gap (originality) or novelty statement, or the unique differences of this research compared to previous studies, also in terms of whether the research is important or not; only then write down the research objectives in this article in a straightforward and clear manner.

RESEARCH METHODS

Fenomena keamanan di wilayah Maluku hingga saat ini masih menjadi persoalan strategis yang kompleks dan multidimensional. Karakter wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang tersebar serta keberagaman sosial masyarakat menjadikan dinamika keamanan di kawasan ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Konflik horizontal yang pernah terjadi pada akhir 1990-an meninggalkan residu sosial berupa trauma kolektif dan ketidakpercayaan antar kelompok masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kembali ketegangan apabila tidak dikelola secara tepat melalui pendekatan keamanan yang adaptif dan sensitif terhadap kondisi sosial budaya setempat. Oleh karena itu, upaya menjaga stabilitas keamanan di Maluku tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan militer konvensional, tetapi memerlukan pendekatan yang mampu membangun kepercayaan dan kedekatan sosial antara aparat keamanan dengan masyarakat. Dalam konteks pengamanan wilayah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional melalui pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu bentuk OMSP yang dilaksanakan di wilayah Maluku adalah Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Ops Pamrahwan) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan, mencegah konflik sosial, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, satuan Yonif 731/Kabaresi memiliki tanggung jawab strategis untuk menjalankan fungsi pengamanan sekaligus membangun hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat setempat. Kehadiran satuan militer di wilayah rawan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan keamanan, tetapi juga sebagai aktor yang mampu memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan rasa aman masyarakat.

Dalam perkembangan studi keamanan kontemporer, pendekatan keamanan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai upaya menghadapi ancaman militer semata. Konsep keamanan modern telah mengalami pergeseran dari pendekatan tradisional menuju pendekatan keamanan non-tradisional yang menekankan aspek manusia, masyarakat, dan stabilitas sosial sebagai bagian dari dimensi keamanan (Caballero-Anthony, 2016). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, sehingga interaksi antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menciptakan kondisi yang kondusif. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks tersebut adalah konsep *soft power*. Nye (2004) menjelaskan bahwa *soft power* merupakan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik nilai, legitimasi, dan kepercayaan, bukan melalui paksaan atau kekuatan militer. Dalam konteks militer, pendekatan *soft power* dapat diwujudkan melalui kegiatan komunikasi sosial, pembinaan teritorial, pelayanan masyarakat, serta kegiatan sosial yang membangun kedekatan antara aparat keamanan dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan militer untuk memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat sehingga kehadiran aparat keamanan tidak dipersepsikan sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan non-koersif memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah yang memiliki kerentanan konflik sosial. Penelitian Ade, Amin, dan Marsingga (2024) menunjukkan bahwa konflik sosial di Maluku sering kali dipicu oleh faktor sosial budaya dan identitas kelompok yang sensitif, sehingga penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan formal tetapi juga memerlukan pendekatan sosial yang mampu membangun rekonsiliasi masyarakat. Penelitian Wicaksono et al. (2023) juga menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan wilayah rawan dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keamanan apabila diiringi dengan kegiatan pembinaan masyarakat yang berkelanjutan. Penelitian lain mengenai strategi *soft power* dalam kebijakan pertahanan menunjukkan bahwa

pendekatan non-koersif dapat meningkatkan legitimasi negara serta memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat (Kurniawan et al., 2024). Studi tersebut menekankan bahwa strategi *soft power* dalam sektor pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai alat diplomasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun stabilitas sosial melalui kepercayaan publik. Selain itu, penelitian mengenai pembinaan teritorial TNI AD menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi sosial, bhakti sosial, dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan (Fatimah et al., 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran TNI dalam menjaga stabilitas keamanan serta pentingnya pendekatan sosial dalam pengelolaan konflik, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada kebijakan pertahanan secara umum atau pada peran institusi TNI secara makro. Kajian yang secara khusus membahas implementasi strategi *soft power* pada tingkat satuan operasional dalam pelaksanaan operasi pengamanan wilayah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai pendekatan *soft power* dalam konteks pengamanan daerah rawan di wilayah kepulauan seperti Maluku juga belum banyak dilakukan secara mendalam. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pendekatan keamanan konvensional atau kebijakan pertahanan secara strategis, sementara implementasi pendekatan *soft power* pada tingkat satuan operasional belum banyak dianalisis secara empiris. Kedua, penelitian mengenai pengamanan wilayah rawan di Maluku umumnya berfokus pada dinamika konflik sosial dan kebijakan keamanan secara umum, namun belum secara spesifik mengkaji bagaimana strategi *soft power* diterapkan oleh satuan militer dalam operasi pengamanan wilayah. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengkaji indikator keberhasilan pendekatan *soft power* dalam konteks pengamanan wilayah yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan penguatan kohesi sosial. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) dalam upaya mengkaji secara lebih mendalam strategi *soft power* yang diterapkan oleh Yonif 731/Kabaresi dalam pelaksanaan Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Maluku. Penelitian ini tidak hanya menganalisis bentuk-bentuk pendekatan *soft power* yang diterapkan oleh satuan militer, tetapi juga mengidentifikasi indikator keberhasilan pendekatan tersebut dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat kohesi sosial, serta mendukung stabilitas keamanan wilayah secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi *soft power* yang diterapkan oleh Yonif 731/Kabaresi dalam Operasi Pengamanan Daerah Rawan di Maluku. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kerawanan keamanan di wilayah Maluku, menganalisis bentuk implementasi pendekatan *soft power* yang dilakukan oleh Yonif 731/Kabaresi dalam pelaksanaan operasi pengamanan wilayah, serta mengkaji indikator keberhasilan pendekatan tersebut dalam meningkatkan stabilitas keamanan dan kohesi sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian strategi pertahanan serta memberikan rekomendasi praktis bagi pelaksanaan operasi pengamanan wilayah yang lebih adaptif, humanis, dan berkelanjutan.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Maluku dengan fokus pada pelaksanaan Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Ops Pamrahwan) oleh Yonif 731/Kabaresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika keamanan di wilayah Maluku dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, geografis, dan informasi yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi,

serta studi dokumentasi, ditemukan beberapa temuan utama yang berkaitan dengan kondisi kerawanan wilayah, implementasi pendekatan *soft power*, serta indikator keberhasilan pendekatan tersebut dalam mendukung stabilitas keamanan.

Bentuk Kerawanan Wilayah di Maluku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerawanan di wilayah Maluku memiliki karakter multidimensional. Kerawanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan potensi konflik fisik, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, serta dinamika informasi yang berkembang di masyarakat. Salah satu bentuk kerawanan yang ditemukan adalah konflik horizontal berbasis identitas sosial dan kelompok. Bentuk konflik ini muncul dalam berbagai bentuk seperti bentrokan antar kelompok masyarakat, perselisihan antar pemuda, serta sengketa batas wilayah antar negeri. Konflik tersebut sering kali dipicu oleh permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat dan dapat meningkat secara cepat ketika melibatkan kelompok massa. Selain konflik sosial, kerawanan lain yang ditemukan adalah sengketa batas wilayah antar negeri yang terjadi secara berulang. Sengketa ini berkaitan dengan batas administrasi maupun kepemilikan wilayah adat. Konflik batas wilayah sering memunculkan ketegangan antar masyarakat di wilayah yang berbatasan dan memerlukan penanganan melalui dialog serta koordinasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan.

Kerawanan juga muncul akibat karakter geografis wilayah Maluku yang berbentuk kepulauan. Jarak antar pulau yang berjauhan menyebabkan keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Kondisi tersebut mempengaruhi kecepatan mobilisasi aparat keamanan serta koordinasi antar wilayah. Selain itu, wilayah kepulauan juga memiliki kerentanan terhadap aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang terlarang melalui jalur laut. Selain faktor geografis, kerawanan di wilayah Maluku juga dipengaruhi oleh dinamika informasi yang berkembang di masyarakat. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi melalui media sosial dapat memicu kesalahpahaman antar kelompok masyarakat. Informasi tersebut sering berkembang secara cepat dan menimbulkan ketegangan sosial sebelum dapat dilakukan klarifikasi oleh pihak terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerawanan yang terjadi di Maluku tidak selalu dimulai dari konflik berskala besar. Sebagian konflik muncul dari peristiwa kecil yang berkembang menjadi konflik terbuka karena melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor relasi sosial dan persepsi masyarakat memiliki pengaruh penting dalam dinamika keamanan wilayah.

Implementasi Pendekatan Soft Power oleh Yonif 731/Kabaresi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yonif 731/Kabaresi menerapkan pendekatan *soft power* dalam pelaksanaan Ops Pamrahwan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada pembangunan hubungan sosial dengan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan komunikasi sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta program pembinaan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi *soft power* adalah kegiatan komunikasi sosial dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta perangkat desa. Kegiatan komunikasi ini dilakukan melalui pertemuan langsung, dialog masyarakat, serta kegiatan bersama yang melibatkan unsur masyarakat dan aparat keamanan. Kegiatan komunikasi sosial menjadi sarana pertukaran informasi antara aparat keamanan dan masyarakat mengenai kondisi keamanan wilayah. Selain komunikasi sosial, Yonif 731/Kabaresi juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan tersebut meliputi karya bhakti, gotong royong perbaikan fasilitas umum, serta kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan unsur

masyarakat setempat. Program pelayanan kesehatan menjadi salah satu kegiatan yang banyak diikuti oleh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personel Yonif 731/Kabaresi memberikan layanan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan dasar bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.

Selain kegiatan sosial, Yonif 731/Kabaresi juga melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan wilayah melalui penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah, balai desa, serta kegiatan masyarakat lainnya yang melibatkan generasi muda. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya program yang melibatkan prajurit dalam kegiatan pendidikan masyarakat. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan edukasi kepada siswa sekolah mengenai nilai kebangsaan, kedisiplinan, serta kesadaran terhadap pentingnya menjaga persatuan masyarakat. Pendekatan *soft power* juga dilaksanakan melalui keterlibatan prajurit dalam kegiatan sosial budaya masyarakat. Prajurit turut berpartisipasi dalam kegiatan adat, kegiatan keagamaan, serta kegiatan sosial masyarakat lainnya. Keterlibatan tersebut memperkuat interaksi sosial antara prajurit dan masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan patroli wilayah juga dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi yang lebih humanis kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan patroli, prajurit tidak hanya melakukan pengawasan keamanan tetapi juga melakukan interaksi sosial dengan masyarakat di wilayah yang dikunjungi.

Indikator Keberhasilan Pendekatan Soft Power

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan *soft power* dapat dilihat dari perubahan pola interaksi antara aparat keamanan dan masyarakat. Salah satu indikator yang terlihat adalah meningkatnya komunikasi antara masyarakat dengan aparat keamanan dalam menyampaikan informasi terkait kondisi keamanan wilayah. Masyarakat di beberapa wilayah memberikan informasi kepada aparat keamanan mengenai potensi gangguan keamanan yang muncul di lingkungan mereka. Informasi tersebut disampaikan melalui tokoh masyarakat maupun melalui komunikasi langsung dengan personel Yonif 731/Kabaresi. Indikator lain yang ditemukan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Yonif 731/Kabaresi. Masyarakat terlibat dalam kegiatan gotong royong, kegiatan sosial, serta kegiatan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan oleh satuan. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan komunikasi dan mediasi konflik juga menjadi salah satu indikator penting. Tokoh adat dan tokoh agama sering berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

Selain itu, kegiatan klarifikasi informasi yang berkembang di masyarakat juga menjadi salah satu indikator dalam menjaga stabilitas sosial. Aparat keamanan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat ketika muncul informasi yang menimbulkan ketegangan di lingkungan masyarakat. Keberlanjutan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh satuan juga menjadi indikator lain dari keberhasilan pendekatan *soft power*. Program yang dilaksanakan secara berkelanjutan menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *soft power* yang diterapkan oleh Yonif 731/Kabaresi dalam pelaksanaan Ops Pamrahwan berperan dalam memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat serta mendukung terciptanya stabilitas keamanan di wilayah Maluku.

Discussion

Analisis Temuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerawanan keamanan di wilayah Maluku memiliki karakter yang kompleks dan multidimensional. Kerawanan tersebut tidak hanya berkaitan

dengan potensi konflik fisik, tetapi juga melibatkan faktor sosial, historis, geografis, dan informasi yang berkembang di masyarakat. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa konflik horizontal, sengketa batas wilayah antar negeri, serta dinamika sosial antar kelompok masyarakat merupakan faktor yang memengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Maluku. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian konflik yang terjadi tidak selalu berawal dari konflik berskala besar. Konflik sering kali berawal dari peristiwa kecil yang berkembang menjadi konflik terbuka karena adanya faktor persepsi kolektif masyarakat serta keterlibatan kelompok yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika keamanan wilayah sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial antar masyarakat serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.

Selain faktor sosial, karakter geografis wilayah Maluku sebagai wilayah kepulauan juga mempengaruhi dinamika keamanan. Jarak antar pulau yang berjauhan serta keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi mempengaruhi mobilitas aparat keamanan serta proses koordinasi antar wilayah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengamanan wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan yang adaptif dan melibatkan kerja sama antara aparat keamanan dan masyarakat. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan *soft power* yang diterapkan oleh Yonif 731/Kabaresi dalam pelaksanaan Ops Pamrahwan dilakukan melalui kegiatan komunikasi sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta program pembinaan masyarakat. Kegiatan komunikasi sosial yang dilakukan dengan tokoh adat, tokoh agama, serta perangkat desa memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat serta memperluas jaringan komunikasi sosial di tingkat lokal. Selain itu, kegiatan sosial seperti karya bhakti, pelayanan kesehatan masyarakat, serta kegiatan pembinaan generasi muda menjadi sarana interaksi sosial yang memperkuat kedekatan antara prajurit dan masyarakat. Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan keamanan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan wilayah, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Indikator keberhasilan pendekatan *soft power* juga terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial serta meningkatnya komunikasi masyarakat dengan aparat keamanan dalam menyampaikan informasi terkait kondisi keamanan wilayah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah.

Keterkaitan Temuan Penelitian dengan Konsep Teoretis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *soft power* memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas keamanan di wilayah yang memiliki kerentanan konflik sosial. Konsep *soft power* yang dikemukakan oleh Nye menjelaskan bahwa pengaruh dapat diperoleh melalui daya tarik, legitimasi, dan kepercayaan, bukan semata melalui kekuatan atau paksaan. Dalam konteks pengamanan wilayah, pendekatan ini tercermin melalui interaksi sosial yang membangun hubungan kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat. Pendekatan *soft power* dalam penelitian ini juga berkaitan dengan konsep keamanan non-tradisional yang menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan. Pendekatan keamanan tidak hanya berfokus pada penanganan ancaman militer, tetapi juga pada upaya pencegahan konflik sosial serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan. Selain itu, temuan penelitian ini juga berkaitan dengan konsep pembinaan teritorial (Binter) dalam sistem pertahanan negara. Pembinaan teritorial menekankan pentingnya hubungan antara TNI dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. Kegiatan komunikasi sosial, bhakti sosial, serta pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari implementasi pembinaan teritorial yang berfungsi memperkuat kemandirian TNI dan

rakyat. Dalam konteks pelaksanaan Ops Pamrahwan, pendekatan *soft power* melalui kegiatan pembinaan teritorial menunjukkan bahwa stabilitas keamanan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pengamanan fisik wilayah, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Semakin kuat hubungan sosial antara aparat keamanan dan masyarakat, semakin besar kemungkinan terciptanya stabilitas keamanan yang berkelanjutan.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam pengelolaan konflik dan stabilitas keamanan wilayah. Penelitian Ade, Amin, dan Marsingga (2024) menunjukkan bahwa konflik sosial di Maluku sering dipengaruhi oleh faktor identitas sosial dan dinamika budaya masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan sosial yang mampu membangun rekonsiliasi antar kelompok masyarakat. Selain itu, penelitian Wicaksono et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan wilayah rawan dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keamanan apabila disertai dengan kegiatan pembinaan masyarakat. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kegiatan sosial dan komunikasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas keamanan. Penelitian Kurniawan et al. (2024) juga menunjukkan bahwa strategi *soft power* dalam kebijakan pertahanan dapat meningkatkan legitimasi negara serta memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Hasil penelitian tersebut mendukung temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa pendekatan *soft power* mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi strategi *soft power* pada tingkat satuan operasional dalam pelaksanaan operasi pengamanan wilayah. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konsep *soft power* dalam konteks kebijakan pertahanan secara makro, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik implementasi pendekatan tersebut dalam kegiatan operasional satuan militer di wilayah rawan.

Novelty Penelitian

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan baru yang memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *soft power* dalam pengamanan wilayah dapat diukur tidak hanya melalui penurunan jumlah konflik atau gangguan keamanan, tetapi juga melalui indikator relasional seperti meningkatnya komunikasi masyarakat dengan aparat keamanan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses mediasi konflik. Dari sisi praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendekatan *soft power* dalam operasi pengamanan wilayah dapat dilakukan melalui integrasi kegiatan komunikasi sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta program pembinaan generasi muda yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pengamanan wilayah tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan konvensional, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pengamanan wilayah yang lebih adaptif, humanis, serta berorientasi pada penguatan hubungan sosial antara aparat keamanan dan masyarakat. Pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu model pengamanan wilayah yang relevan dalam menghadapi dinamika keamanan di wilayah yang memiliki kerentanan konflik sosial seperti Maluku.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerawanan keamanan di wilayah Maluku memiliki karakter yang multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sosial, historis, geografis, serta dinamika informasi yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks tersebut, strategi pengamanan wilayah yang dilakukan oleh Yonif 731/Kabaresi dalam Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Ops Pamrahwan) tidak hanya berorientasi pada pendekatan keamanan konvensional, tetapi juga melalui pendekatan *soft power* yang menekankan pada pembangunan hubungan sosial antara aparat keamanan dan masyarakat. Implementasi pendekatan tersebut terlihat melalui kegiatan komunikasi sosial dengan tokoh masyarakat, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, pelayanan kesehatan masyarakat, serta kegiatan pembinaan generasi muda. Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas keamanan wilayah dapat diperkuat melalui peningkatan kepercayaan masyarakat, partisipasi sosial, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan *soft power* dalam pengamanan wilayah dapat dilihat melalui indikator relasional yang mencerminkan perubahan pola interaksi antara masyarakat dan aparat keamanan. Peningkatan komunikasi masyarakat dengan aparat keamanan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh satuan, serta peran tokoh masyarakat dalam proses mediasi konflik menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengamanan wilayah di daerah yang memiliki kerentanan konflik sosial membutuhkan pendekatan yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada penguatan kohesi sosial masyarakat. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena fokus penelitian hanya pada satu satuan militer dan wilayah penelitian yang terbatas pada konteks Maluku sehingga hasil penelitian belum menggambarkan secara menyeluruh implementasi pendekatan *soft power* dalam operasi pengamanan wilayah di daerah lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial sehingga belum mengukur secara kuantitatif pengaruh pendekatan *soft power* terhadap tingkat penurunan gangguan keamanan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih luas dengan melibatkan beberapa satuan militer di wilayah yang berbeda serta menggunakan pendekatan penelitian campuran untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas strategi *soft power* dalam pengamanan wilayah.

BIBLIOGRAPHY

- Ade, P. R., Amin, M. A., & Marsingga, P. (2024). Sebab-sebab utama dan sebab-sebab pemicu faktor sosial budaya dalam konflik etnis di Maluku. *Politics and Humanism*, 3(1), 45–50.
- Agussalim, D. (2020). Dari traditional security ke non-traditional security: Evolusi konsep keamanan dan relevansinya bagi upaya penguatan ketahanan dan keamanan. *Jurnal Majellis*, 6, 55–66.
- Caballero-Anthony, M. (2016). An introduction to non-traditional security studies. *Asian Security*, 12(2), 87–103. <https://doi.org/10.1080/14799855.2016.1183152>
- Fatimah, F., Yani, Y. M., & Suryana, A. (2022). Operasi militer selain perang dalam rangka penanggulangan bencana alam di Indonesia: Peluang, tantangan, dan studi komparasi. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(2), 101–112. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10083>
- Kurniawan, A., Siregar, H., & Nasution, R. (2024). Peningkatan peran intelijen TNI sebagai strategi soft power pada kebijakan pertahanan guna penanganan terorisme. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2), 176–183. <https://doi.org/10.31289/publika.v12i2.12856>

- Nye, J. S. (2017). Soft power and public diplomacy revisited. *The Hague Journal of Diplomacy*, 12(2–3), 198–203. <https://doi.org/10.1163/1871191X-12341366>
- Nye, J. S. (2021). Soft power: The evolution of a concept. *Journal of Political Power*, 14(1), 196–208. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2021.1879572>
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson Education.
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (2018). *Petunjuk tentang pembinaan teritorial TNI AD*. Markas Besar TNI AD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wicaksono, A., Hadi, S., & Prasetyo, B. (2023). Peran Puspenerbad TNI AD dalam mendukung operasi pengamanan daerah rawan di Maluku. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 176–182.
- Widiyanti, N. (2025). Strategi pertahanan Indonesia dalam menghadapi kompleksitas keamanan kawasan Asia Pasifik pada tahun 2019–2023. *Global Insight Journal*, 2(1), 34–45.